

Judul : Wakil Ketua BKSAP: Amnesti Din Minimi Jangan Cuma Janji
Tanggal : Sabtu, 18 Juni 2016
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Wakil Ketua BKSP: Amnesti Din Minimi Jangan Cuma Janji



Syaifullah Tamliha

RENCANA pemberian amnesti untuk mantan kelompok sparatis Aceh, Din Minimi belum juga terealisasi. Terlebih, kalangan Dewan banyak yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Namun, Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha kembali meminta semua pihak mendukung rencana pemberian amnesti tersebut.

"Pemberian amnesti ini jangan dipolitisasi. Kita sebaiknya mendukung, karena pemberian amnesti ini bisa menjadi preseden baik bagi keamanan nasional ke depan," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, kemarin.

Menurut Syaifullah, keberadaan kelompok bersenjata di Aceh perlu diperhatikan secara khusus, sesuai kesepakatan Helsinki. Dia berharap, dengan adanya amnesti, kelompok bersenjata di daerah lain seperti Papua atau Poso mau melakukan kesepakatan damai.

"Langkah-langkah seperti itu (amnesti) akan mereduksi keberadaan kelompok bersenjata yang selama ini mengganggu stabilitas. Dengan begitu, proses pembangunan akan berjalan lebih lancar dan kondusif," katanya.

Syaifullah mengingatkan pemerintah agar pemberian amnesti kepada Din Minimi bukan sebatas janji. Dia khawatir jika

pemerintah tak menepati janji pemberian amnesti, kelompok-kelompok bersenjata di wilayah lain yang selama ini masih sering melancarkan aksinya, akan menutup opsi berdamai dengan pemerintah.

"Penolakan amnesti bisa membawa efek negatif bagi Indonesia, bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Pemerintah bisa dianggap tidak menghargai kelompok bersenjata yang kooperatif," cetusnya.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) menginginkan, setelah pemberian amnesti dikaji dan diputuskan secara seksama, publik dapat melihat itu dalam konteks kepentingan negara yang lebih baik.

"Kelompok Din Minimi bisa jadi membuat kelompok bersenjata lain taubat. Mereka bisa dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa ke depan," pungkasnya.

Pada rapat kerja antara Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan dengan Komisi I dan Komisi III di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (15/2), kalangan Dewan menolak rencana pemberian amnesti kepada Din Minimi.

Luhut pun menyatakan akan segera melapor kepada Presiden Joko Widodo. "Saya kira Amnesti untuk Din Minimi setelah konsultasi dengan DPR akan dibicarakan kapan akan kita berikan, saya akan laporkan kepada presiden sekembalinya presiden dari Amerika," ujarnya.

Untuk diketahui, wacana Pemerintah memberi amnesti kepada kelompok bersenjata Aceh di bawah pimpinan Nurdin Ismail atau Din Minimi bergulir seiring penyerahan diri kelompok bersenjata tersebut, yang difasilitasi oleh Ketua Badan Intelijen Negara (BIN), Sutyoso. ■ QAR